

# PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## *THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN NUSA TENGGARA TIMUR*

**Christina Natalia Sitorus**  
Universitas Pembangunan Nasional  
kitin\_maniez@yahoo.com

**Budi Sitorus**  
Sekretariat Jenderal Kementerian  
Perhubungan  
budi\_dephub@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to identify the existing condition of East Nusa Tenggara (NTT) region in the provision of road and transportation infrastructure development and the provision of connectivity. The research method used is descriptive qualitative research methodology with policy analysis approach. Data collection uses secondary data obtained from various sources and processed for analysis and evaluation. East Nusa Tenggara Province has an area of 4,734,990 hectares with a total population of 5,036,687. From the total population, there are poor people of 1.1500.080 people or equal to 22.01 %. NTT province has a wide range of potential areas such as food crops, agriculture, plantations, livestock, forestry, fisheries and marine, and mining. Those resources along with human resources are expected to improve the welfare and economic growth of people in disadvantaged areas.*

**Keywords:** *development of transportation infrastructure; regional connectivity; benefits development*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukenali kondisi eksisting wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam penyediaan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi dan penyediaan konektivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis kebijakan. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber dan diolah untuk dianalisis dan dievaluasi. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas wilayah 4.734.990 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 5.036.687. Dari jumlah tersebut terdapat penduduk miskin sebanyak 1.1500.080 orang atau sebesar 22,01 %. Provinsi NTT memiliki beraneka ragam potensi daerah seperti tanaman pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, dan pertambangan. Dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tertinggal.

**Kata Kunci:** pembangunan infrastruktur transportasi; konektivitas wilayah; manfaat pembangunan

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar suatu negara dan bangsa, dimana pada intinya belum meratanya tingkat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi belum seutuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Dimana hubungan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi.

Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, faktor tersebut adalah rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percaya diri dan terbebas kebebasan ketiga aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran dan rendahnya investasi perkapita. (Todaro dan Smith (2006:232).

Dalam Undang Undang Dasar 1945 diamanahkan bahwa negara memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin kesejahteraan warga negara. Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat secara perlahan dan di bawah negara kawasan ASEAN, pemerintah terus meningkatkan pembangunan dalam program Nawa Cita, untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk melihat kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah, dalam laporan Bank Dunia bulan Juni 2016 menyampaikan bahwa serangkaian kebijakan yang pro-aktif telah membantu bertahannya ekonomi Indonesia, termasuk kebijakan moneter yang penuh kehati-hatian, bertambahnya investasi infrastruktur pemerintah, dan reformasi kebijakan untuk memperkuat iklim investasi. Namun, resiko terhadap ekonomi meningkat baik resiko

internasional maupun domestik. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,1% dan tahun 2017 sebesar 5,3%, hal ini tidak berubah dari proyeksi *Indonesia Economi Quarterly* Maret 2016.

(<http://www.worldbank.org>). Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 1.192 pulau, 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Pulau besar berpenghuni menempati wilayah yang lebih dikenal dengan Flobamorata (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 47.931,54 km<sup>2</sup>, memiliki sumber daya alam yang beragam berpotensi untuk meningkatkan perkonomian wilayahnya. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu permasalahan kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat lama sekolah dan melek huruf serta infrastruktur transportasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka, literatur, *benchmarking*, pengamatan lapangan dalam rangka mendapatkan data informasi akurat.

Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi, evaluasi dan analisis permasalahan terhadap pembangunan infrastruktur transportasi dalam rangka pengembangan wilayah dan membuka keterisolasian wilayah dengan menggunakan pendekatan kebijakan publik untuk mencari solusi terhadap permasalahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam *KBBI*, kata perbatasan berasal dari kata batas yang berarti garis (sisi) yang menjadi perhinggaan suatu bidang (ruang, daerah); pemisahan antara dua bidang (ruang, daerah) sampadan. Soegijoko (1994:153) memberi batasan wilayah perbatasan merupakan wilayah khusus karena perbatasan dengan wilayah negara tetangga, sehingga penanganan pembangunannya memerlukan kekhususan.

Oleh karena itu, menganut pendapat para ahli untuk pengelolaan kawasan perbatasan diperlukan pendekatan khusus, seperti penanganan keamanan dan keamanan perbatasan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, dan peningkatan kesejahteraan. Berikut ini beberapa penelitian terkait pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan seperti diuraikan di bawah ini.

Upaya pencapaian pengembangan wilayah dan ekonomi di Kota Balikpapan sangat terkait dengan penyediaan infrastruktur Kota Balikpapan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana dasar bagi warga masyarakat seperti prasarana jalan, saranapemukiman, air bersih, kebersihan kota, dan drainase kota. Oleh karena itu upaya pengembangan infrastruktur perkotaan dan kualitas lingkungan hidup perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan kota dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang baik. Adapun saran dari penelitian sebagai berikut perkembangan infrastruktur dan ekonomi yang meningkat memang sangat dibutuhkan oleh Kota Balikpapan saat ini untuk mendorong pendapatan masyarakat. Namun, pembangunan infrastruktur yang baik akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berdampak merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Balikpapan. Beberapa infrastruktur yang juga dibutuhkan dan perlu direncanakan untuk dibangun di Kota Balikpapan antara lain pembangunan Stadion Balikpapan, pembangunan Jembatan Teluk Balikpapan, pembangunan segmen 2 *coastal road*, pembangunan jaringan pipa PDAM, dan penyediaan listrik, bermanfaat juga sebagai pemasukan bagi Pemerintah Kota Balikpapan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Provinsi Nusa

Tenggara Timur pada tahun 2015 yaitu tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat lama pendidikan sekolah dan infrastruktur jalan dan transportasi, adapun penanganan permasalahan sebagai berikut :

### A. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan persoalan dasar tiap daerah, sehingga penanganannya harus dilakukan secara lintas sektor. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskin

Jumlah penduduk di Nusa Tenggara Timur tahun 2016 sebanyak 5.203.514 jiwa, mendiami 47.349,9 km<sup>2</sup> dari luas wilayah daratan Nusa Tenggara Timur dengan tingkat kepadatan penduduk 110 jiwa per kilometer persegi. Di bidang perumahan, kondisi perumahan penduduk Nusa Tenggara Timur antara lain tergambar sebagai berikut : sebagian besar rumah tangga Nusa Tenggara Timur (88,53 persen) menempati rumah milik sendiri, sebagian besar beratapkan seng (86,16), rumah dengan dinding selain tembok dan kayu mencapai 40,34 persen dan jenis bahan lantai sebagian besar rumah di Nusa Tenggara Timur adalah bukan tanah.

Meninjau kondisi konsumsi dan pengeluaran rumah tangga Nusa Tenggara Timur, peningkatan kesejahteraan penduduk dapat dilihat melalui adanya kenaikan persentase penduduk pada kelompok pengeluaran di atas Rp.500.000,- rupiah perkapita per bulan atau lebih dan semakin berkurangnya proporsi pengeluaran untuk keperluan makanan yang selanjutnya bergeser pada pengeluaran untuk keperluan

bukan makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 sebesar Rp. 576.627,-

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sejak tahun 2010 bergulirnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sehingga tiap daerah diwajibkan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan arahan RPJMD tersebut pemerintah provinsi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas. Pembangunan penanggulangan kemiskinan telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari perkembangan penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan.

Pada tahun 2012 presentase penduduk miskin di NTT sebesar 20,41% menurun menjadi 20,24 % pada tahun 2013, kemudian menurun lagi menjadi 19,60 % pada tahun 2014. Sementara itu, presentase penduduk miskin tingkat nasional pada tahun 2012 sebesar

11,66 % menurun menjadi 11,47% pada tahun 2013, kemudian menurun lagi menjadi 19,60% pada tahun 2014. Pada bulan maret tahun 2015 presentase penduduk miskin di provinsi NTT sedikit mengalami peningkatan menjadi 22,61%, kemudian menurun menjadi 22,01% pada bulan September tahun 2016.

Peningkatan presentase penduduk miskin di NTT sebagai dampak kebijakan kenaikan BBM yang mempengaruhi peningkatan garis kemiskinan akibat kenaikan

52 jenis bahan makanan dan 51 jenis non makanan, dan penguatan nilai mata uang asing terhadap Rupiah. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2015 sebesar 5,02%.

### **B. Tingkat Pengangguran**

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan

Februari 2016 mencapai 3,59%, meningkat 0,47 poin dibandingkan bulan Februari 2015 sebesar

3,12 persen. Pengangguran bulan Februari 2016 mencapai 88.000 orang, bertambah

13.000 orang dibanding Februari 2015 sebesar 75.000 orang. Berdasarkan pendekatan status pekerja dalam pekerjaan utama, pekerja dengan status formal di NTT hanya sebesar 21,58 persen, sedangkan pekerja informal 78,42 persen atau 4 (empat) dari lima pekerja di NTT.

Sebagai upaya mengurangi tingkat pengangguran hal perlu dilakukan adalah komitmen Pemerintah untuk menjalankan program pembangunan yang padat karya dan padat modal, serta dukungan peran sektor swasta menumbuhkan lapangan kerja secara berkesinambungan, serta meningkatkan peran usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui kemudahan berusaha dan pemberian modal usaha.

### **C. Infrastrukur Jalan**

Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2015, Provinsi NTT memiliki panjang jalan sebanyak 2.560, 29 km terbagi menjadi status jalan Negara sebanyak 88,80 km, dan jalan Provinsi 2.471,49 km.

Sehubungan dengan hal di atas, jalan di Kabupaten Timor Tengah Selatan menempati posisi pertama dengan jumlah jalan sebanyak 306,34 km (11,96%), diikuti oleh Kabupaten Kupang sebanyak 271,76 km (10,61%) dan Kabupaten Sumba Tengah menempati posisi terakhir dengan jumlah jalan sebanyak 43,98 km (1,71%).

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan amanah untuk mewujudkan pembangunan dan ketersediaan APBD Provinsi NTT tahun 2016 sebesar Rp. 3,548 Triliun dibagi menjadi dana pembangunan sebesar 71% dan PAD sebesar 27%.

Dari anggaran tahun 2015, dengan jumlah pendapatan sebesar Rp.3,28 Triliun hal tersebut terlihat dengan pembangunan

infrastruktur jalan yang seharusnya berbanding lurus dengan kualitas jalan di Provinsi NTT. Hal ini dapat dilihat kondisi jalan tahun

2015 dibagi berdasarkan kewenangan yaitu kondisi jalan baik (1.189,04 km), sedang (306,59 km), rusak (349,41 km) dan rusak berat (626,33 km).

Terkait dengan hal di atas, kondisi jalan baik menempati peringkat ke-1 sebanyak 1.189,04 km atau sebesar 46,44%, diikuti peringkat ke-2 yaitu kondisi jalan rusak berat sebanyak 626,33 km atau sebesar 24,46%, dan kondisi jalan rusak sebanyak 349,41 km atau sebesar 13,64%.

#### **D. Pengembangan Konektivitas dan Aksesibilitas Melalui Penyediaan Infrastruktur Transportasi Yang Memadai**

Sebagai amanah dalam visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Nawa Cita, Kementerian Perhubungan memiliki fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi, hal tersebut kemudian diterjemahkan dalam program kegiatan dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

Kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan tahun 2015 di Provinsi NTT dengan anggaran sebesar Rp.1,066 Triliun dengan pekerjaan sebanyak 42 yaitu melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi kapal penyeberangan, pembangunan terminal Antar Lintas Batas Negara, sektor transportasi darat. Untuk sektor transportasi laut telah dilaksanakan pekerjaan repowering kapal negara kenavigasian, dan lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tenau Kupang, subsidi operasional angkutan perintis pangkalan Kupang, pembangunan Faspel laut Nunbaunsabu.

Kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi yang telah dilaksanakan tahun 2016 di Provinsi NTT dengan anggaran sebesar Rp.547,6 Miliar dengan pekerjaan sebanyak 58 yaitu

melaksanakan peningkatan kinerja lalu lintas kota Kupang, Pengadaan Subsidi perintis Waingapu-Kefamanu-Kupang-Ende, Subsidi Kapal Penyeberangan Perintis Kupang-Lewoleba, Subsidi Kapal Penyeberangan Perintis Kupang-Ende, Subsidi Kapal Penyeberangan Perintis Kupang-Teluk Gurita-Ilwaki-Kisar, Pembangunan Dermaga Penyeberangan Raijua Kab. Sabu Raijua, Pembangunan Kapal Penyeberangan Lintas Kupang-P.Ndao 750 GT. Untuk sektor transportasi laut telah dilaksanakan pekerjaan pembangunan rambu pelabuhan 20 meter darat Pelabuhan Waewole, Pembangunan rambu pelabuhan 20 meter darat Pelabuhan Lewoleba, Pembangunan Rambu suar single pipa 10 meter laut pada alur masuk pelabuhan Sulamu dan lampu pelabuhan 20 meter darat pelabuhan, Replace lampu pelabuhan 20 meter darat pelabuhan, Pembangunan Ramsu 10 meter laut merah hijau alur masuk pelabuhan Biu.

Pembangunan infrastruktur transportasi yang dilaksanakan sejak tahun 2015-2016 bertujuan untuk meningkatkan keselamatan jalan, menurunkan kecelakaan lalu lintas, meningkatkan pelayanan di pelabuhan laut, serta meningkatkan konektivitas wilayah. Berdasarkan data BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015, terdapat sebanyak 257.794 penumpang dan sebanyak 2.478 trip perjalanan. Untuk volume bongkar muat barang di pelabuhan laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 600.286 bongkar dan sebanyak 53.409 muat. Sementara itu arus kunjungan kapal laut mencapai 5.501 untuk kapal datang dan sebanyak 5.501 kapal berangkat.

Berdasarkan pendapat ahli telah dijelaskan di atas terkait pembangunan wilayah perbatasan, maka kebijakan yang perlu diperlukan diperhatikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan isu strategis nasional, tantangan pembangunan kewilayahan untuk itu pembangunan infrastruktur transportasi, perlu terus didorong untuk dapat dilakukan adalah :

1. Konektivitas wilayah perlu terus dikembangkan melalui pemberian subsidi perintis, kerjasama operasional (KSO) dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), kerjasama yang dilakukan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan perundangan. Kementerian Perhubungan selama tahun 2015 dan tahun 2016 telah memberikan subsidi perintis untuk wilayah yang membutuhkan, seperti ke daerah Waingapu, Kefamanu, Kupang, Ende, dan subsidi untuk kapal penyeberangan perintis Kupang- Lewoleba, Kupang-Ende, Kupang-Teluk Gurita-Ilwaki-Kisar. Hal tersebut dilakukan dalam rangka bingkai kesatuan NKRI dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah selama tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya ketersediaan lahan guna pengembangan/peningkatan infrastruktur transportasi.
3. Perlunya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan sektor transportasi.
4. Perlunya konsistensi dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Strategis dan Masterplan serta Konsep Tata Ruang Wilayah.

## SIMPULAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan luas wilayah 47.931,54 km<sup>2</sup>, memiliki sumber daya alam yang beragam, sedangkan permasalahan yang dihadapi yaitu permasalahan kemiskinan, tingkat pengangguran, serta infrastruktur jalan dan transportasi.

Dalam pelaksanaan program

pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat beberapa hal-hal pokok sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi provinsi sebesar 5,02% (tahun 2015), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 62,67 (tahun 2015).

Untuk menghubungkan wilayah tidak hanya diperlukan pembangunan infrastruktur transportasi tetapi diperlukan pula konektivitas wilayah dan integrasi antar moda sebagai upaya untuk menekan biaya logistik dan menumbuhkan perekonomian suatu wilayah.

Yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah meningkatkan konektivitas wilayah dengan cara mengembangkan jaringan pelayanan transportasi dan integrasi antarmoda melalui pemberian subsidi perintis dan pembangunan infrastruktur transportasi. Mendorong peran swasta dalam pembangunan prasarana dan sarana transportasi baik dengan Kerjasama Operasional (KSO), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Peran serta stakeholder dalam memberikan pelayanan yang sifatnya perintis agar pelayanan dapat dilakukan secara maksimal. Menetapkan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional agar pelaku usaha dapat meningkatkan mutu dan kualitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soegijoko S. 1994. "Percepatan pembangunan daerah perbatasan". *Jurnal PWK* 5: 50-55.
- M.P. Todaro, & Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta.
- Dunn, William N. 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

World Bank, 2016. Laporan Triwulanan  
Perekonomian Indonesia Maret 2016  
<http://www.worldbank.org>. Diakses  
tanggal 31 Januari 2017

Halaman ini sengaja dikosongkan.